

RESEARCH ARTICLE

Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung

Syahdan Arip Saputra ¹, Rola Manjaleni ^{2*}

^{1,2*} Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Indonesia.

Email: syahdan10221098@digitechuniversity.ac.id ¹, rolamanjaleni@digitechuniversity.ac.id ^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 25 Januari 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 Februari 2025; Diterima 10 Maret 2025; Diterbitkan 1 April 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Saputra, S. A., & Manjaleni, R. (2025). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Karyalaksana Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(2), 849–857. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i2.3920>.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh alokasi dana desa, kebijakan desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibum. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel sebanyak 96 orang dan melakukan regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan kesejahteraan masyarakat yang merupakan variabel terikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kolektif, ketiga faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan kebijakan desa sebagai faktor yang paling berpengaruh. Hasil penelitian ini memperkuat bahwa tata kelola pemerintahan desa yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi pengelolaan dana desa dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa merupakan komponen penting untuk mencapai hasil pembangunan yang optimal. Implikasinya, pemerintah desa perlu meningkatkan efektivitas kebijakan dan pengelolaan BUMDes untuk memberikan dampak ekonomi lebih luas. Studi ini juga memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi dalam mengembangkan strategi pembangunan berbasis tata kelola yang baik.

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa; Kebijakan Desa; Badan Usaha Milik Desa; Kesejahteraan Masyarakat; Pembangunan Desa.

Abstract

This study examines the influence of village fund allocations, village policies, and Village-Owned Enterprises (BUMDes) on community welfare in Karyalaksana Village, Ibum Subdistrict. This study used quantitative methods with a sample of 96 people and conducted multiple linear regression to determine the relationship between the independent variables and community welfare, which is the dependent variable. The results showed that collectively, the three factors had a significant effect on community welfare, with village policy being the most influential factor. The results of this study reinforce that effective village governance is essential for improving community welfare. In addition, transparency in the management of village funds and community involvement in the formulation of village policies are important components for achieving optimal development outcomes. The implication is that village governments need to improve the effectiveness of BUMDes policies and management to provide wider economic impact. This study also provides insights for academics and practitioners in developing good governance-based development strategies.

Keyword: Village Fund Allocation; Village Policy; Village-Owned Enterprises; Community Welfare; Village Development.

1. Pendahuluan

Desa merupakan wilayah dengan dominasi sektor pertanian yang terletak di luar kawasan perkotaan. Desa lebih dari sekadar lokasi geografis, melainkan juga merupakan hasil interaksi dinamis antara masyarakat dan lingkungan sekitar, yang menciptakan ruang untuk berkembangnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya yang mencerminkan nilai serta tradisi lokal (Prayitno et al., 2022). Desa memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan warganya, berdasarkan aturan adat dan hak asal-usul yang diakui oleh hukum negara (Manjaleni, 2024). Sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia, desa memiliki batas wilayah yang jelas dan menjalankan fungsinya melalui pengelolaan yang melibatkan partisipasi masyarakat, hak tradisional, serta prinsip kemandirian. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, di antaranya pendapatan asli desa, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah, serta pajak daerah. Desa dapat menerima dana dari APBD provinsi, kabupaten/kota, dan negara sesuai dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu, desa juga dapat menerima sponsor dan donasi dari pihak ketiga, dengan catatan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu jenis pendanaan desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. ADD berasal dari APBD kabupaten/kota dengan alokasi minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota. Dengan pengelolaan yang efisien dan transparan, ADD dapat meningkatkan kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat setempat, serta mendukung pembangunan dan pengembangan desa. ADD juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program yang berbasis pada kebutuhan lokal (Marcelleno et al., 2023). Kebijakan desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini mencakup pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan program pembangunan yang memberikan dampak langsung pada masyarakat (Dewi & Sapari, 2020).

Penyusunan kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan ekonomi. Salah satu instrumen penting dalam pertumbuhan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berperan sebagai pelopor ekonomi berbasis lokal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes dibentuk dengan tujuan untuk mengelola potensi ekonomi desa secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial dan komersial, BUMDes berperan dalam menyediakan layanan untuk masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi desa. Dengan manajemen yang profesional dan berbasis kebutuhan lokal, BUMDes dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil di tingkat desa (Puspitasari & Gufron, 2023). Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan mencakup pemenuhan kepentingan dasar, baik ekonomi, mental, maupun sosial. Indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan desa antara lain pendapatan, kesehatan, dan akses pendidikan (Kurniawan, 2019). Data BPS menunjukkan adanya tren peningkatan kesejahteraan desa dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dampak pandemi COVID-19 sempat menghambat. Meskipun demikian, pemulihan ekonomi mulai terlihat dengan berbagai upaya pemulihan ekonomi dan program kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan alokasi dana dan implementasi kebijakan yang efektif (M. T. Sari & Mildawati, 2020). Teori *Stewardship* menggambarkan kepemimpinan di mana manajer bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi secara kolektif. Dalam teori ini, manajer lebih mengutamakan keberhasilan organisasi daripada kepentingan pribadi, dengan menekankan kerja sama, tanggung jawab, dan komitmen terhadap visi bersama. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan organisasi (Donaldson, 1997 dalam Dewi & Sapari, 2020). Sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan untuk meningkatkan keseimbangan keuangan antarwilayah dan berfungsi sebagai sumber pendanaan utama untuk mendukung berbagai aspek pembangunan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, serta

RESEARCH ARTICLE

peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan yang baik terhadap *ADD* dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa (Patimah & Saepuloh, 2025). Kebijakan desa, sebagai regulasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan di tingkat desa, sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan kebijakan desa, pemerintah desa dapat menjalankan fungsinya dalam hal pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan lebih mandiri dan efektif (Sari, 2019). Pemerintah desa dan masyarakat bersama-sama mengelola Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Pembentukan *BUMDes* disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Agar *BUMDes* dapat berjalan efektif, dibutuhkan tata kelola yang baik, termasuk perencanaan strategis dalam pengelolaan modal dan aset. Dengan manajemen yang optimal, *BUMDes* dapat meningkatkan pendapatan desa, menciptakan lapangan kerja, dan memberdayakan ekonomi masyarakat (Januarista & Kustiwa, 2024).

Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kondisi di mana individu atau kelompok hidup dalam keadaan yang stabil, makmur, dan memiliki kualitas hidup yang layak. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial, yang memungkinkan setiap individu untuk mengembangkan potensinya serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Menurut Ida Safitri (2023), terdapat sejumlah indikator yang dapat dijadikan acuan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, antara lain: Pendapatan, Perumahan dan pemukiman, Kesehatan, dan Pendidikan. Kerangka Pemikiran Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi, setiap variabel independen (X) memengaruhi variabel dependen (Y) secara parsial. Alokasi Dana Desa (*X1*), Kebijakan Desa (*X2*), dan Badan Usaha Milik Desa (*BUMDes*) (*X3*) memengaruhi kesejahteraan masyarakat (Y). Ketiga variabel ini juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara simultan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa *ADD* berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sementara kebijakan desa memiliki pengaruh besar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan (Kurniawan, 2019; Yohana & Hermanus, 2020; Rosyada et al., 2021). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait hubungan sinergis antara *ADD*, kebijakan desa, dan peran *BUMDes* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Karyalaksana, yang terletak di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi pembangunan desa yang lebih transparan, berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lebih efisien. Hipotesis: H1: Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. H2: Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. H3: Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. H4: Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan *BUMDes* berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif, yang memfokuskan pada analisis data numerik melalui teknik statistik untuk menguji hubungan kausal antara variabel yang diteliti. Pendekatan ini diterapkan secara sistematis dan terstruktur mulai dari tahap perancangan hingga analisis data (Jaya, 2020). Pendekatan kuantitatif memfasilitasi pengumpulan data yang dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik, matematis, atau komputasional untuk memperoleh temuan yang objektif dan berbasis empiris (Ramdhan, 2021). Sebagai penelitian deskriptif, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai fenomena atau permasalahan, baik pada tingkat individu, masyarakat, maupun organisasi. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan hubungan antarvariabel tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai objek yang diteliti (Darwin et al., 2021).

RESEARCH ARTICLE

2.1 Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan populasi yang menjadi subjek utama dalam pengumpulan dan analisis data, yang mencakup 2.546 Kepala Keluarga di Desa Karyalaksana, Kecamatan Ibun, yang memenuhi kriteria penelitian (Musa, 2023; Sugiyono, 2019). Sampel yang diambil sebanyak 96 responden menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana untuk memastikan representasi yang akurat tanpa mempertimbangkan stratifikasi populasi (Meida, 2021). Ukuran sampel yang digunakan telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu berada dalam rentang 30 hingga 500 responden (Sugiyono, 2019).

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data melalui penggunaan skala Likert untuk memudahkan pengukuran variabel yang diteliti dalam kuesioner yang disusun. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui hasil pengisian kuesioner oleh responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, dan referensi online yang relevan. Data sekunder ini digunakan sebagai landasan teoritis yang mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

2.3 Teknik Analisis

Penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, data dianalisis menggunakan teknik regresi linier berganda. Metode ini memungkinkan identifikasi hubungan serta pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Perhitungan analisis dilakukan menggunakan program statistik SPSS versi 26, yang memastikan hasil analisis yang akurat dan efektif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat kelayakan dan tidak melanggar asumsi dasar yang diperlukan, dilakukan uji asumsi klasik. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa estimasi parameter regresi yang diperoleh bersifat akurat, tidak bias, dan konsisten. Dengan memenuhi asumsi dasar, hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dapat diandalkan.

Tabel 1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	639.653.313
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.069
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

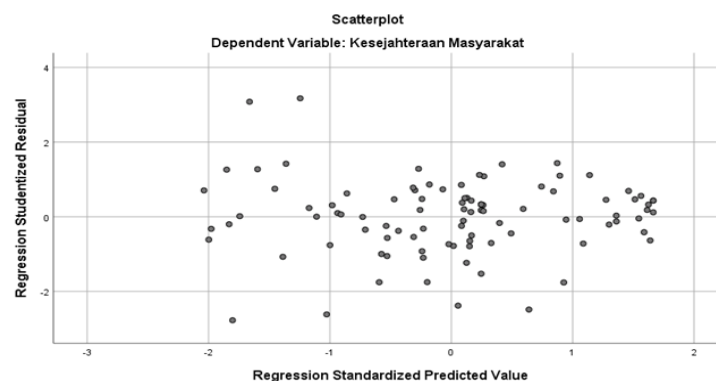
RESEARCH ARTICLE

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi residual model regresi bersifat normal. Premis normalitas telah terpenuhi, dan model regresi dapat digunakan secara sah untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 2. Uji Multikoloniartitas

Variabel	Tolerance	VIF
Alokasi Dana Desa	0.466	2.144
Kebijakan Desa	0.230	4.353
Badan Usaha Milik Desa	0.281	3.560

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai faktor variasi inflasi (VIF) kurang dari 10 serta semua variabel memperoleh nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Untuk Alokasi Dana Desa (X1) adalah 2,144, Kebijakan Desa (X2) adalah 4,353, dan Badan Usaha Milik Desa (X3) adalah 3,560. Model regresi yang digunakan tidak menghadapi masalah multikolinieritas, jadi asumsi statistik yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut dipenuhi.



Gambar 1. Scatterplot Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot menunjukkan bahwa titik data tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga model regresi yang digunakan tidak menunjukkan heteroskedastisitas. Oleh karena itu, asumsi homoskedastisitas yang diperlukan untuk analisis regresi dipenuhi.

Tabel 3. Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.362	3.828		.095	.925
1 Alokasi Dana Desa	.317	.148	.204	2.144	.035
1 Kebijakan Desa	.543	.197	.374	2.761	.007
1 Badan Usaha Milik Desa	.202	.091	.272	2.219	.029

a. Dependent Variable: Penerapan SAK EMKM

RESEARCH ARTICLE

Hasil analisis regresi linier berganda menjadi dasar persamaan regresi yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam penelitian ini:

$$Y = 0,362 + 0,317X_1 + 0,543X_2 + 0,202X_3 + e$$

Tingkat kesejahteraan masyarakat diprediksi sebesar 0,362 jika seluruh variabel independen bernilai nol, menurut hasil interpretasi model regresi. Selain itu, dengan asumsi variabel lain tetap sama, setiap peningkatan satu unit pada variabel Alokasi Dana Desa (X_1) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 31,7%, setiap peningkatan satu unit pada variabel Kebijakan Desa (X_2) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 54,3%, dan setiap peningkatan satu unit pada variabel Badan Usaha Milik Desa (X_3) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebesar 20,2%. Hal ini menyatakan bahwa pengelolaan dana desa secara efektif mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.782 ^a	.611	.599	6.500
a. Predictors: (Constant), Badan Usaha Milik Desa, Kebijakan Desa, Alokasi Dana Desa				

Nilai adjusted R^2 sebesar 0,599 menyatakan variabel Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mampu menjelaskan 59,9% dari variasi kesejahteraan masyarakat. 40,1% terakhir dipengaruhi oleh komponen tambahan yang tidak tercakup dalam model penelitian ini. Hasil ini menyatakan bahwa, meskipun seluruh variabel utama memberikan kontribusi yang signifikan, ada faktor luar yang juga memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di desa.

Tabel 5. Uji T

Variabel	t Hitung	t Tabel	Sig	Keterangan
Alokasi Dana Desa (X_1)	2.144	1.986	0.035	Berpengaruh Signifikan
Kebijakan Desa (X_2)	2.761	1.986	0.007	Berpengaruh Signifikan
Badan Usaha Milik Desa (X_3)	2.219	1.986	0.029	Berpengaruh Signifikan

Hasil pengujian t menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa (sig. 0,035; $t = 2,144$), Kebijakan Desa (sig. 0,007; $t = 2,761$), dan BUMDes (sig. 0,029; $t = 2,219$) mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan Masyarakat. Semua variabel menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, yang berarti bahwa mereka benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 6. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.117.973	3	2.039.324	48.268	.000
	Residual	3.886.985	92	42.250		
	Total	10.004.958	95			
a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat						
b. Predictors: (Constant), Badan Usaha Milik Desa, Kebijakan desa, Alokasi Dana Desa						

RESEARCH ARTICLE

Uji F menemukan nilai 48,268 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan BUMDes secara keseluruhan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, model regresi yang digunakan dianggap valid untuk menggambarkan hubungan antara variabel tersebut.

3.2 Pembahasan

Alokasi Dana Desa (ADD) berperan sebagai instrumen utama dalam mendorong pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan penguatan perekonomian di tingkat desa. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa kenaikan ADD sebesar 1% berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebesar 31,7%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh ADD. Hasil uji parsial (*T-test*) menunjukkan nilai signifikansi 0,035 yang lebih kecil dari batas signifikansi 0,05 dan nilai *T-hitung* sebesar 2,144 yang lebih besar dari nilai *T-tabel* sebesar 1,986. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawan (2019), yang menyatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan ADD meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Namun, untuk memastikan keberlanjutan manfaat ADD, pengelolaan keuangan desa yang transparan dan dapat diawasi sangat diperlukan. Kebijakan desa, yang berperan strategis dalam mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, juga terbukti signifikan. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan desa sebesar 1% berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 54,3%. Hipotesis H2 diterima berdasarkan hasil uji parsial, dengan nilai signifikansi 0,007 (kurang dari 0,05) dan nilai *T-hitung* 2,761 (lebih besar dari *T-tabel* 1,986). Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan desa yang efektif dan terarah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dewi & Sapari (2020), yang menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan desa. Kebijakan yang inklusif dan jelas memungkinkan masyarakat memanfaatkan program pembangunan secara maksimal. Selain itu, BUMDes juga berperan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan usaha berbasis potensi lokal. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa peningkatan peran BUMDes sebesar 1% berkontribusi sebesar 20,2% terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hipotesis H3 diterima berdasarkan hasil uji parsial (*T-test*), dengan nilai signifikansi 0,029 (< 0,05) dan nilai *T-hitung* 2,219 (lebih besar dari *T-tabel* 1,986). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes yang efektif memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan desa. Menurut Puspitasari & Gufron (2023), BUMDes dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui penciptaan lapangan kerja dan pendorong ekonomi lokal. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, BUMDes perlu menerapkan pendekatan manajerial yang lebih berkelanjutan dan berbasis partisipasi masyarakat. Ketika ADD, kebijakan desa, dan BUMDes dialokasikan secara bersamaan, hasil uji simultan (*F-test*) menunjukkan bahwa ketiga variabel ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan analisis ANOVA, nilai *F-hitung* sebesar 48,268 dengan tingkat signifikansi 0,000 (< 0,05) menunjukkan bahwa ketiga variabel ini berkontribusi secara sinergis terhadap pembangunan desa. Namun, jumlah dana yang dialokasikan tidak menjadi satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan desa. Selain itu, kebijakan desa yang efektif dan pengelolaan BUMDes yang baik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian statistik, dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Secara parsial, ADD menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan nilai signifikansi 0,035 (kurang dari 0,05) dan nilai *t-hitung* 2,144 yang lebih besar dari nilai *t-tabel*. Kebijakan desa juga memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan

RESEARCH ARTICLE

masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,007 dan nilai *t-hitung* 2,761 yang lebih besar dari nilai *t-tabel*. Selain itu, BUMDes turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan nilai signifikansi 0,029 dan nilai *t-hitung* 2,219 yang lebih besar dari nilai *t-tabel*. Secara simultan, ADD, kebijakan desa, dan BUMDes memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat, dengan hasil uji *F* menunjukkan nilai *F-hitung* sebesar 48,268 dan tingkat signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang mengindikasikan kontribusi sinergis ketiga variabel tersebut terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat disampaikan, antara lain: pertama, pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana desa dan merancang kebijakan yang lebih mengedepankan partisipasi aktif masyarakat. Kedua, BUMDes perlu meningkatkan kapasitas manajemen dan inovasi bisnis agar dapat lebih berkontribusi terhadap ekonomi desa. Ketiga, penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan metode campuran (kuantitatif dan kualitatif) serta memperluas cakupan penelitian ke beberapa desa untuk menghasilkan temuan yang lebih generalizable.

5. Referensi

- Desa, D., Anggoro, B., No, J. Z. A. P. A., & Ratu, L. (2022). Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi (JIMASIA)*, 2(2), 54-61.
- Dewi, F. G. R., & Sapari, S. (2020). Pengaruh akuntabilitas alokasi dana desa, transparansi, kebijakan desa, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(5).
- IDA, S. (2023). *ANALISIS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MELALUI PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN DIBLK BANDAR LAMPUNG DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TAHUN 2023* (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Indonesia, P. N. R. (2014). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Indonesia, R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. *Jakarta Republik Indones*.
- Januarista, A. A., & Kustiwa, A. (2024). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Strategi Pemasaran Di Bidang Digital Printing Di Desa Cicangkang Hilir, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 876-883. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1329>.
- Kuantitatif, P. P. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Kurniawan, T. H. (2019). *Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan)* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).
- Marcelleno, M., Mukaromah, S., Azzahra Maharani Safitri, N., & Imanuel, L. (2023). Analisis kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(02), 62-74. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.764>.
- Nomor, U. U. (6). *tahun 2014 tentang Desa*.

RESEARCH ARTICLE

- Nunung, F. R. A., & Purwanda, E. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Aspek Perencanaan Di Desa Pataruman. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 10(3), 1736-1740. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2441>.
- Patimah, R., & Saepuloh, C. (2025). Analisis penerapan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa Girimukti Kecamatan Saguling Kabupaten Bandung Barat. 13(2), 1–10. <https://doi.org/10.52859/jbm.v13i2.747>.
- Puspitasari, L., & Gufron, M. (2023). Pengaruh badan usaha milik desa (BUMDes) dan pemberdayaan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Economina*, 2(8), 2064–2075. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.718>.
- Rosyada, D., & Kayupa, G. P. J. (2021). Pengaruh Persepsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Pendolo Kabupaten Poso. *Jurnal Sinar Manajemen*, 8(1), 57-70. <https://doi.org/10.56338/jsm.v8i1.1661>.
- Sari, M. T., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, transparansi, dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(12).
- Satriani, Y., Reo, H., & Ismail, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat:(Studi Kasus Pada Desa Lepo Lima Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 1(1), 35-44.